

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

2.6. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa DPMPTSP Jawa Barat sudah memiliki sifat atau karakteristik *Agile Government* dalam kewajibannya menyelenggarakan OSS dari pemerintah pusat. *Agile government* yang ditunjukkan dari pemerintah yakni DPMPTSP Jawa Barat adalah dengan terlaksananya keempat karakteristik dalam *Agile Government*. Lebih jauh keempat karakteristik tersebut adalah Short Term Frontline Responsiveness (Responsifitas Jangka Pendek), Strategic Adaptation (Adaptasi Strategis), Outcome Focus (Fokus kepada hasil), dan terakhir adalah Preventing or Reducing Problems before they arise (Mencegah atau mengurangi permasalahan sebelum timbul).

Kendati demikian masih ditemukannya kendala atau masalah yang terjadi dalam mewujudkan *Agile Government* dari DPMPTSP Jawa Barat dalam menyelenggarakan OSS. Kendala tersebut berkaitan dengan variabel kedua yakni adaptasi strategis. Pada variabel tersebut terdapat indikator ruang atau kesempatan untuk berinovasi. Dalam hasil temuan hal tersebut tidak terlalu ditampakkan karena OSS yang merupakan sistem dari pemerintah pusat tidak bisa dirubah atau dikembangkan lebih jauh oleh dinas. DPMPTSP Jawa Barat sendiri telah berupaya membuka ruang atau

pengembangan tersebut dengan integrasi oleh SIMPATIK namun integrasi belum bisa dilakukan sempurna karena pemerintah pusat belum membuka akses integrasi tersebut sepenuhnya.

Selain daripada kendala pada variabel kedua, ditemukan juga kendala pada variabel keempat yakni pencegahan/pengurangan antisipasi permasalahan melalui adanya mekanisme. Berdasarkan hasil temuan, ternyata mekanisme antisipasi permasalahan pada DPMPTSP Jawa Barat dalam implementasi OSS tidak terlalu terjadi. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya koordinasi, mekanisme monitoring dan evaluasi yang diadakan pemerintah pusat dan dinas penyelenggara. Dengan begitu tentu akan menyulitkan pemerintah daerah melalui dinas dalam upayanya mengoptimalkan penyelenggaraan sistem OSS. Lebih jauh berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan tadi dapat disimpulkan bahwa lebih banyak kendala yang ditampakkan karena tidak terbukanya komunikasi dan peran pemerintah pusat.

2.7.Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk tetap mewujudkan keberadaan *Agile Government* oleh DPMPTSP Jawa Barat dalam menyelenggarakan OSS adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan integrasi sistem OSS dengan inovasi sistem sebelumnya yakni SIMPATIK yang segera dilakukan dan dibuka akses integrasinya dari pemerintah pusat agar lebih mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan perizinan.

2. Diperlukan mekanisme koordinasi komunikasi yang terbuka dan cepat kepada pemerintah pusat dalam pengoptimalan OSS mengingat sistem tersebut adalah dari pemerintah pusat.
3. Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat dalam rangka menyempurnakan kinerja program layanan atau sistem OSS dan membantu pemerintah daerah dalam mengelola permasalahan yang muncul pada implementasi sistem OSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Creswell John. W, *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Method Approaches 4th Edition*. California : SAGE Publication Inc, 2014.
- Creswell, Dijah Arundina, Silalahi Ulber, *Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Unpar Press, 2017.
- Jumanah, Aldin Vicky dkk, *Menggagas Revolusi Mental Birokrasi Melalui Konsep Competitive*. Bandung : Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah, 2020.
- Marsono dkk, *Penyusunan Profil Best Practices PTSP Sintesa Model Pelayanan Perizinan Beyond PTSP*. Jakarta : Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara, 2015.
- Mohamad Dadang, *Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat 2018-2023*, Bandung : DPMPTSP Jawa Barat ,2019.
- Moleong Lexy , Setiantika Tri & Tuti Retnowati, Silalahi Ulber, *Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung :Unpar Press, 2017.
- ORI (Ombudsman RI), *Laporan Hasil Inisiatif Ombudsman, Kepatuhan Penyelenggara terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Sesuai UU No.25 Tahun 2009*, Jakarta Selatan : Ombudsman. 2017.
- Parker Simon dkk, *Towards Agile Government*. United Kingdom : Demos, 2008.

Sills Deborah, *Agile in Government*. UK : The Deloitte Center, 2017.

Taufiqurahman, Denhardt&Denhardt, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang : UMJ Press, 2018.

Sumber Media Internet

Amarullah, *Tantangan Responsivitas Layanan Publik*, diakses pada Oktober 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4766695/tantangan-responsivitas-layanan-publik>

Heriani Novia, *Sejumlah hambatan yang perlu disempurnakan dalam OSS*, diakses pada 30 Januari 2021,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da96cb9788c4/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss/>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Apa Itu Simpatik?*, diakses pada 13 Januari 2021,

<https://dpmpptsp.jabarprov.go.id/jo/faq/>

Priatna Hadi (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI), *Pelaksanaan Sistem OSS dan Pokok-pokok PP No. 24 Tahun 2018*, diakses pada 16 Oktober 2020,

<https://dpmpptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules/arsip/files/87a3c1ea8d9cac2c06ef002df89556e0.pdf>

Widodo Joko, *OSS/Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik*, BPKPM : Jakarta, diakses pada 16 Oktober 2020, <https://oss.go.id/portal/>

Perundang-undangan

UU No. 25 Tahun 2009

Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018